



TREN PENINDAKAN
KASUS KORUPSI
TAHUN 2019



LATAR BELAKANG

- ✘ Proses penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum belum transparan dan akuntabel.
- ✘ Ketiadaan informasi secara komprehensif mengenai penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK.
- ✘ Usaha memantau kinerja penanganan perkara korupsi oleh penegak hukum dalam tahap penyidikan.



LATAR BELAKANG

- × Berdasarkan Rule of Law Index tahun 2019 yang dikeluarkan oleh World Justice Project, Indonesia menempati urutan ke-62 dari 126 negara dengan skor 0,52 dari skala 0-1.
- × Sedangkan dalam parameter tidak adanya korupsi, Indonesia menempati urutan ke 97 dari 126 Negara dengan skor 0,38 dari skala 0-1.
- × Di tingkat regional, Indonesia menempati urutan ke-14 dari 15 Negara terkait dengan parameter tidak adanya korupsi.



HASIL PEMERINGKATAN KOMISI INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019

- ✘ KIP memberikan tiga klasifikasi penilaian terhadap badan publik, antara lain: informatif, menuju informatif, dan cukup informatif.
- ✘ KPK mendapatkan predikat lembaga non struktural yang menuju informatif.
- ✘ Kepolisian dan kejaksaan tidak masuk dalam ketiga klasifikasi hasil pemeringkatan tersebut.



TUJUAN

Pemetaan terhadap kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum.




Mendorong transparansi dan akuntabilitas informasi data penanganan kasus korupsi pada institusi penegak hukum (kejaksaan, kepolisian, dan KPK)



METODOLOGI



Metode

- ✗ Penggalian informasi
 - ✗ Tabulasi data
 - ✗ Olah data
 - ✗ Komparasi data
 - ✗ Analisis deskriptif
- 
- 
- 

Sumber Data


- ✗ Media massa
- ✗ Media daring
- ✗ Siaran pers penegak hukum

Waktu

- ✗ 1 Januari – 31 Desember 2019
- 
- 
- 



KINERJA PENINDAKAN KASUS
KORUPSI TAHUN 2019



TEMUAN UMUM



Jumlah kasus
271 kasus



Jumlah tersangka
580 orang



Jumlah kerugian Negara
Rp8,4 triliun



Jumlah suap
Rp 200 miliar

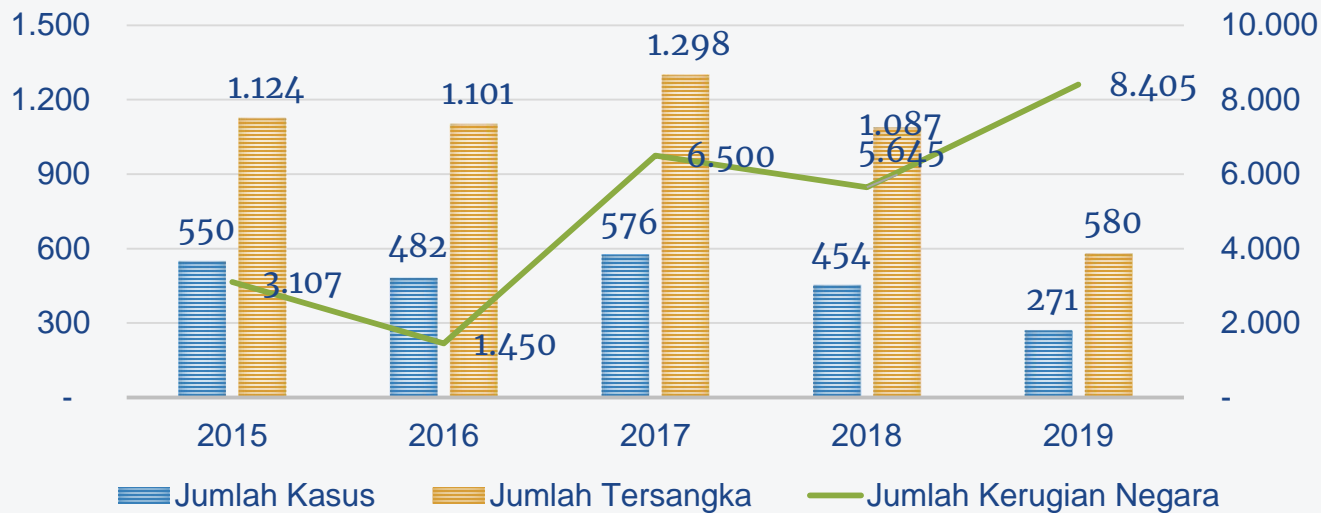


Jumlah pungutan liar
Rp3,7 miliar



Jumlah pencucian uang
Rp108 miliar

TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI TAHUN 2015-2019



- ✘ Penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum secara gradual dari tahun 2017 hingga 2019 menurun, baik dari jumlah kasus maupun jumlah tersangka.
- ✘ Kerugian negara sepanjang lima tahun terakhir fluktuatif

KORUPSI BERDASARKAN MODUS

No	Keterangan	Jumlah	Nilai KN	Nilai Suap	Nilai Pungli	Nilai Pencucian Uang
1.	Suap	51	-	Rp169,5 miliar	-	Rp46 miliar
2.	Mark up	41	Rp172,3 miliar	-	-	Rp11 miliar
3.	Penyalahgunaan anggaran	39	Rp1,4 triliun	-	-	-
4.	Penggelapan	35	Rp71 miliar	-	-	-
5.	Penyalahgunaan wewenang	30	Rp6,3 triliun	-	-	-
6.	Kegiatan/proyek fiktif	22	Rp257,9 miliar	-	-	-
7.	Laporan fiktif	22	Rp113,6 miliar	-	-	-
8.	Pungutan liar	11	-	-	Rp1 miliar	-
9.	Gratifikasi	7	-	Rp31,2 miliar	-	Rp51 miliar
10.	Pemerasan	7	-	Rp100 juta	Rp2,7 miliar	-
11.	Penyunatan/Pemotongan	5	Rp5,4 miliar	-	-	-
12.	Mark down	1	Rp680 juta	-	-	-

- ✘ Suap merupakan modus yang paling dominan dilakukan oleh para tersangka korupsi.
- ✘ Modus penyalahgunaan wewenang tidak terlalu dominan namun nilai kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar bahkan cenderung destruktif. Contohnya kasus lingkungan hidup yang berdampak pada eksploitasi lahan yang dapat merusak lingkungan. Meskipun penyalahgunaan wewenang tidak hanya terjadi di isu lingkungan.

CONTOH KASUS KORUPSI BERMODUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG

- ✗ Kasus dugaan korupsi penerbitan IUP di Kabupaten Kotawaringin Timur yang melibatkan Supian Hadi selaku Bupati dan merugikan negara sebesar Rp5,8 triliun.
- ✗ Kasus dugaan korupsi penawaran penjualan atau pengambilalihan IUP seluas 400 hektare di Jambi yang melibatkan anak perusahaan PT Antam, PT Indonesia Coal Resources dengan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp91,5 miliar.
- ✗ Kasus dugaan korupsi pemberian IUP pada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau yang melibatkan mantan Kepala Dinas ESDM dengan menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp30 miliar.

KORUPSI BERDASARKAN JENIS

No	Keterangan	Jumlah	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/Gratifikasi	Nilai Pungli	Nilai Pencucian Uang
1.	Kerugian keuangan negara	194	Rp8,4 triliun	-	-	-
2.	Suap menyuap	50	-	Rp169,5 miliar	-	-
3.	Pemerasan	17	-	Rp100 juta	Rp3,6 miliar	-
4.	Gratifikasi	6	-	Rp31,2 miliar	-	-
5.	Pencucian uang	3	-	-	-	Rp108 miliar
6.	Penggelapan dalam jabatan	1	Rp91,2 juta	-	-	-

✘ Tahun 2019 tidak ada satu pun kasus yang dijerat dengan pasal benturan kepentingan dalam pengadaan dan perbuatan curang.

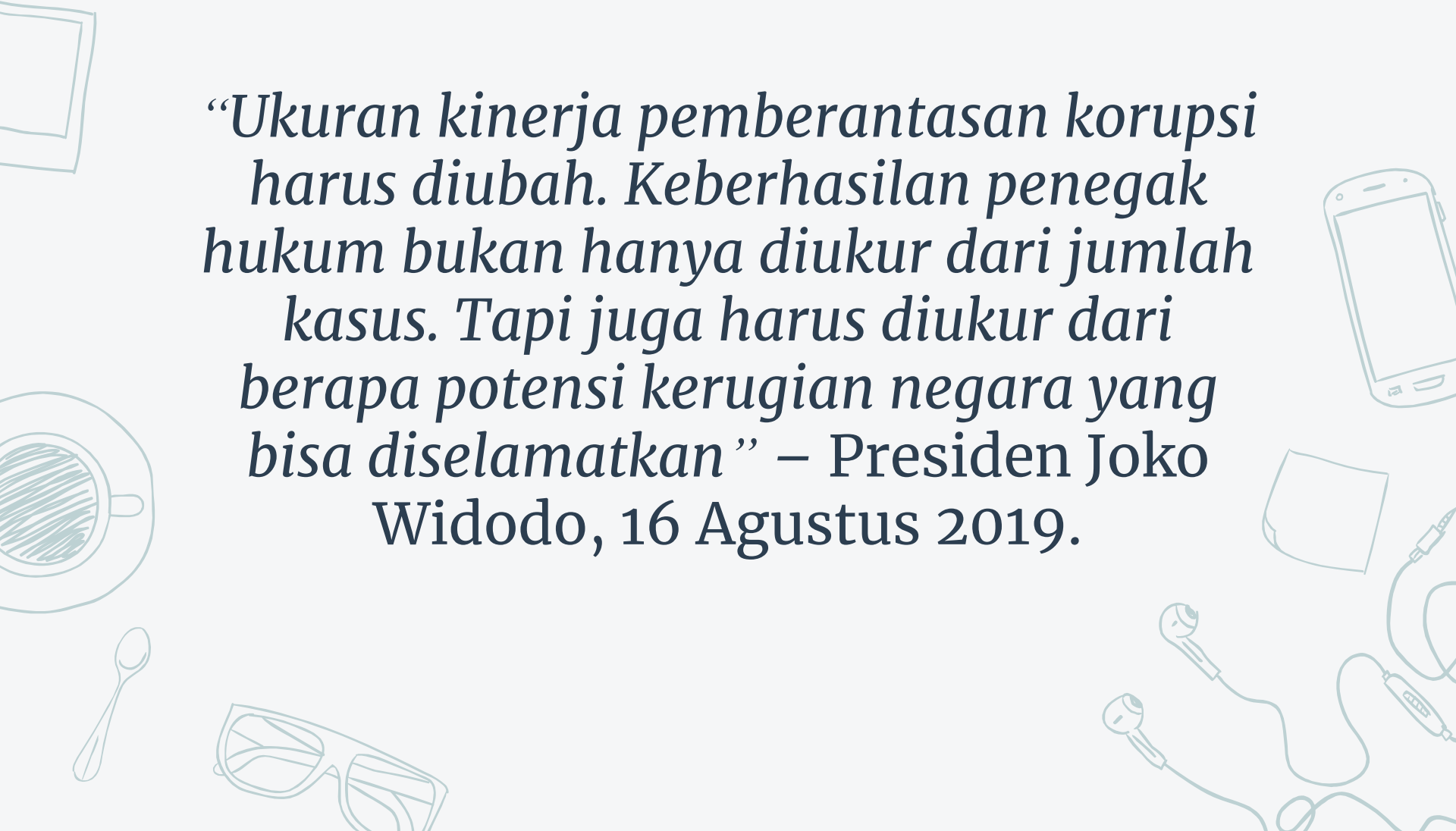
PENGENAAN PASAL PENCUCIAN UANG TERHADAP KASUS KORUPSI

- ✗ Pada tahun 2019 penegak hukum mengenakan pidana pencucian uang terhadap tiga kasus korupsi atau sekitar 1,1 persen dari total kasus yang ditangani. Sedangkan pada tahun 2018 penegak hukum dapat mengenakan pencucian uang terhadap tujuh kasus korupsi atau sekitar 1,5 persen.
- ✗ Salah satu contoh kasus yang dikembangkan dan dikenakan pasal pencucian uang yaitu kasus suap pengadaan mesin Rolls-Royce yang melibatkan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.
- ✗ Hal ini menunjukkan ketidakseriusan penegak hukum dalam menerapkan konsep asset recovery dalam upaya memiskinkan pelaku korupsi agar menimbulkan efek jera.
- ✗ Bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang berencana memprioritaskan aset recovery.



KRITIK PRESIDEN JOKO WIDODO TERKAIT KINERJA PEMBERANTASAN KORUPSI

“Ukuran kinerja pemberantasan korupsi harus diubah. Keberhasilan penegak hukum bukan hanya diukur dari jumlah kasus. Tapi juga harus diukur dari berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan” – Presiden Joko Widodo, 16 Agustus 2019.



KORUPSI BERDASARKAN ANGGARAN

No	Keterangan	Jumlah	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap
1.	Belanja	212	Rp2,1 triliun	Rp154,5 miliar
2.	Penerimaan	11	Rp42,5 miliar	Rp5,3 miliar
3.	Lain-lain	48	Rp6,2 triliun	Rp40,9 miliar

✘ Sektor belanja publik masih sangat rawan dikorupsi. Hal ini timbul karena dua kemungkinan, pertama, karena sektor belanja publik lebih mudah dikorupsi oleh ASN/PN. Kedua, karena orientasi penegak hukum yang lebih focus pada sektor belanja publis, belum masuk ke sektor penerimaan negara.

KORUPSI BERDASARKAN JENIS ANGGARAN

No	Keterangan	Jumlah	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap
1.	Pengadaan	174	Rp957,3 miliar	Rp91,5 miliar
2.	Non Pengadaan	97	Rp7,4 triliun	Rp109,3 miliar

- ✘ Korupsi pengadaan barang dan jasa secara kuantitas lebih banyak dibandingkan dengan non pengadaan. Meskipun demikian, dampak kerugian ekonomi yang sangat besar muncul dari aspek non pengadaan.
- ✘ Dampak korupsi di sektor pengadaan terletak pada buruknya kualitas barang publik, tidak dapat dimanfaatkannya barang publik, atau jika dipergunakan akan sangat membahayakan masyarakat, misalnya buruknya kualitas gedung sekolah yang bisa berakibat pada ambruknya gedung sekolah dan mengancam nyawa siswa yang sedang belajar.

KORUPSI BERDASARKAN SEKTOR (10 BESAR)

No	Keterangan	Jumlah	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap	Nilai Pungli	Nilai Pencucian Uang
1.	Anggaran Desa	46	Rp32,3 miliar	-	Rp130 juta	-
2.	Transportasi	31	Rp434,3 miliar	Rp46,7 miliar	-	Rp46 miliar
3.	Pemerintahan	30	Rp135,1 miliar	Rp35,9 miliar	Rp11 juta	-
4.	Pendidikan	18	Rp38,3 miliar	-	-	-
5.	Pertanahan	16	Rp111,2 miliar	Rp22,4 miliar	Rp7 juta	Rp11 miliar
6.	Perbankan	14	Rp1,5 triliun	-	-	-
7.	Kesehatan	11	Rp23,1 miliar	Rp50 juta	Rp171 juta	-
7.	Pengairan	11	Rp16,5 miliar	Rp1 miliar	-	-
8.	Sosial kemasyarakatan	9	Rp8,2 miliar	-	Rp110 juta	-
9.	Pemilu	7	Rp63,7 miliar	Rp8,9 miliar	-	-
9.	Ketenagakerjaan	7	Rp1,2 miliar	Rp695 juta	Rp260 juta	-
10.	Olahraga	6	Rp10,7 miliar	Rp26,5 miliar	-	-
10.	Energi dan listrik	6	Rp5,5 miliar	Rp39,6 miliar	-	Rp51 miliar
10.	Perdagangan	6	Rp2,7 miliar	Rp3,2 miliar	-	-

KORUPSI BERDASARKAN SEKTOR (DAMPAK)

No	Keterangan	Jumlah	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap	Nilai Pungli	Nilai Pencucian Uang
1.	Bencana alam	5	Rp2,1 miliar	Rp460 juta	Rp10 juta	-
2.	Pertambangan	4	Rp5,9 triliun	-	-	-
3.	Pengadilan (Hukum)	3	-	Rp246 juta	-	-
4.	Kejaksaan dan Kepolisian (Hukum)	3	-	Rp136,5 juta	Rp1 miliar	-
5.	Lapas	2	Rp1 miliar	-	-	-

- ✘ Kasus pada sektor bencana alam seperti kasus dugaan korupsi dana bencana gempa Lombok.
- ✘ Kasus pada sektor pertambangan yang menimbulkan kerugian negara sangat besar seperti kasus dugaan suap penerbitan Izin Usaha Pertambangan oleh Bupati di Kotawaringin Timur, Supian Hadi. Nilai kerugian negaranya mencapai Rp5,8 triliun.
- ✘ Kasus pada sektor peradilan seperti kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara perdata di Mahkamah Agung yang melibatkan Sekretaris MA, Nurhadi.
- ✘ Kasus pada sektor penegakan antara lain: 1). pemerasan saksi kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari yang dilakukan oleh Jaksa; dan 2). Kasus dugaan pungutan liar untuk membebaskan tersangka kasus penadahan barang curian yang dilakukan oleh polisi.
- ✘ Kasus pada sektor lapas seperti suap pemberian fasilitas atau perizinan ke luar lapas Klas I Sukamiskin yang dilakukan oleh Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Huesin.

KORUPSI BERDASARKAN WILAYAH (10 BESAR)

No	Keterangan	Jumlah	Nilai KN	Nilai Suap	Nilai Pungli	Nilai Pencucian Uang
1.	Nasional	29	Rp612,6 miliar	Rp122,3 miliar	Rp1 miliar	Rp46 miliar
2.	Jawa Barat	21	Rp1,1 triliun	Rp24,3 miliar	Rp5 juta	Rp51 miliar
3.	Jawa Timur	19	Rp25 miliar	Rp4,8 miliar	Rp808 juta	-
4.	Nusa Tenggara Barat	14	Rp6,1 miliar	Rp1,3 miliar	Rp1,5 miliar	-
5.	Jawa Tengah	13	Rp17,1 miliar	Rp426 juta	Rp82 juta	-
6.	Aceh	11	Rp65,8 miliar	-	-	-
	Sulawesi Selatan		Rp18,7 miliar	-	Rp110 juta	-
	Jambi		Rp111,1 miliar	-	-	-
7.	Lampung	10	Rp41,8 miliar	Rp13,9 miliar	Rp11 juta	-
	Bengkulu		Rp2,3 miliar	Rp538juta	Rp30 juta	-
	Sulawesi Tengah		Rp102,7 miliar	-	-	-
8.	Sumatera Barat	8	Rp8,4 miliar	Rp493 juta	-	-
	Bali		Rp5,3 miliar	Rp2 juta	-	Rp11 miliar
9.	Sumatera Utara	7	Rp18 miliar	Rp500 juta	Rp180 juta	-
	Papua Barat		Rp8,5 miliar	-	-	-
10.	Riau	6	Rp106,8 miliar	Rp3,1 miliar	-	-
	Banten		Rp5,7 miliar	Rp150 juta	Rp40 juta	-

KORUPSI BERDASARKAN LEMBAGA (10 BESAR)

No	Keterangan	Jumlah kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap	Nilai Pungli	Nilai Pencucian Uang
1.	Pemerintah Kabupaten	95	Rp6,1 triliun	Rp42,8 miliar	Rp2,1 miliar	Rp62 miliar
2.	Pemerintah Desa	48	Rp32,7 miliar	-	Rp212 juta	-
3.	Pemerintah Kota	23	Rp40,9 miliar	Rp1,2 miliar	Rp185 juta	-
4.	Kementerian	20	Rp259,9 miliar	Rp58,2 miliar	-	-
5.	BUMN	18	Rp1,3 triliun	Rp84,5 miliar	Rp1 miliar	Rp46 miliar
6.	Pemerintah Provinsi	16	Rp130 miliar	Rp153 juta	Rp11 juta	-
7.	Badan/Lembaga Negara	10	Rp117,6 miliar	Rp16,6 juta	-	-
8.	DPRD	9	Rp90,8 miliar	Rp4,8 miliar	-	-
9.	BUMD	8	Rp199 miliar	-	-	-
10.	Penegak Hukum (kejaksaan, kepolisian, pengadilan)	6	-	Rp482 juta	Rp40 juta	-

KORUPSI BERDASARKAN AKTOR (10 BESAR)



Jumlah tersangka =
580 orang



Laki-laki
341 orang



Perempuan
40 orang

NA
199 orang



(1)
ASN
213 orang



(2)
Swasta
149 orang



(3)
Kepala
Desa
45 orang



(4)
Dirut /
Staf
BUMN
26 orang



(5)
Aparatur
Desa
19 orang



(6)
Kepala
sekolah
16 orang



(6)
Ketua / staf
organisasi
/ kelompok
16 orang



(6)
Bupati/
Wakil
Bupati
16 orang



(7)
Ketua /
Anggota
DPRD
15 orang



(8)
Ketua /
Anggota
DPR
9 orang



(8)
Dirut/Staff
BUMD
9 orang



(8)
Jaksa
9 orang



(9)
Masyarakat
7 orang



(10)
Wali Kota /
Wakil Wali
Kota
5 orang



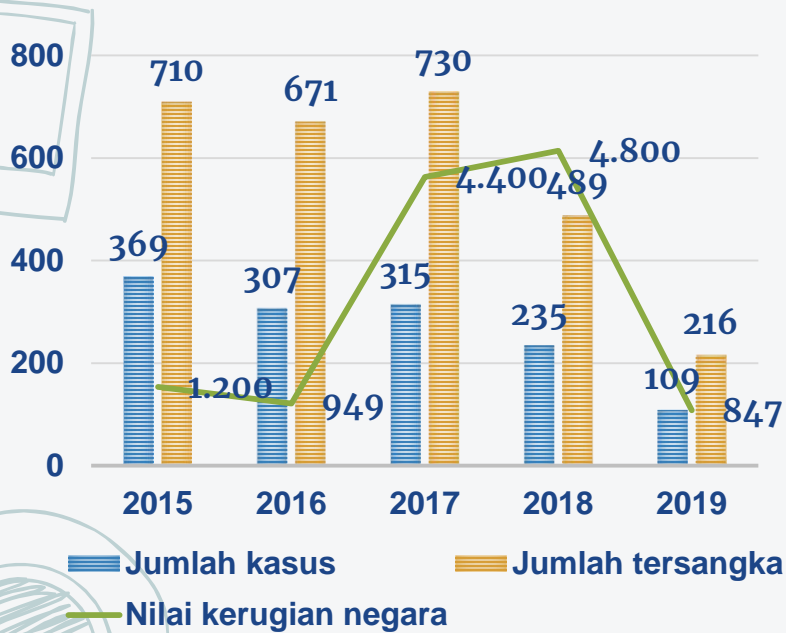
- ✘ *Menurunnya upaya pemidanaan terhadap korporasi dalam perkara korupsi. Pada tahun 2019 penegak hukum hanya mengenakan pidana korporasi terhadap tiga perusahaan. Sementara pada tahun 2018 penegak hukum dapat memidana delapan korporasi sebagai tersangka kasus korupsi. Hal ini*
- ✘ *Salah satu kasus yang menjerat korporasi yaitu kasus dugaan korupsi kepengurusan anggaran Bakamla untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone menggunakan APBN-P tahun anggaran 2016 yang ditangani oleh KPK dengan menetapkan PT Merial Esa sebagai tersangka.*



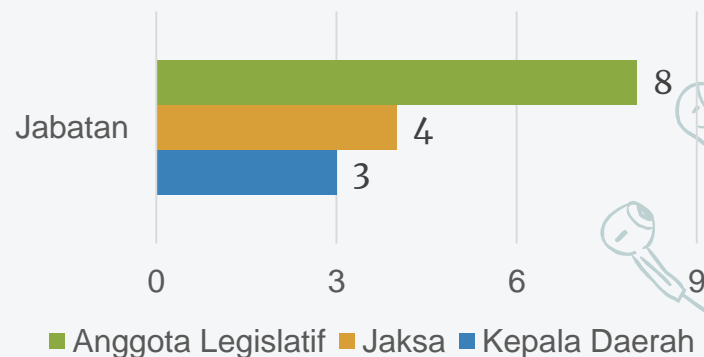
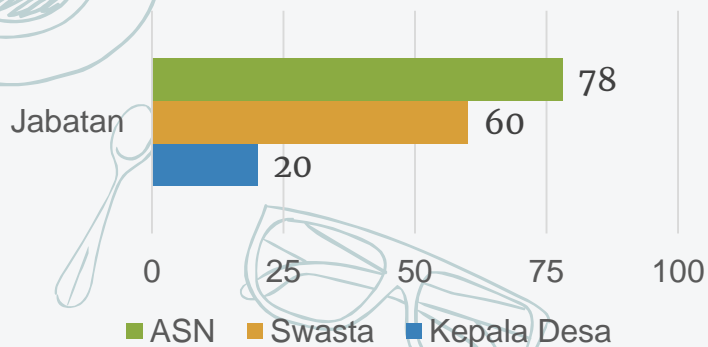
SUMMARY: KINERJA PENINDAKAN KASUS KORUPSI OLEH PENEGAK HUKUM

No	Keterangan	Jumlah kasus	Jumlah aktor	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap	Nilai Pungli	Nilai Pencucian Uang
1.	Kejaksaan	109	216	Rp847,8 miliar	Rp256,6 juta	Rp3 miliar	Rp11 miliar
2.	Kepolisian	100	209	Rp1,3 triliun	Rp202,1 juta	Rp 707 juta	-
3.	KPK	62	155	Rp6,2 triliun	Rp200 miliar	-	Rp97 miliar

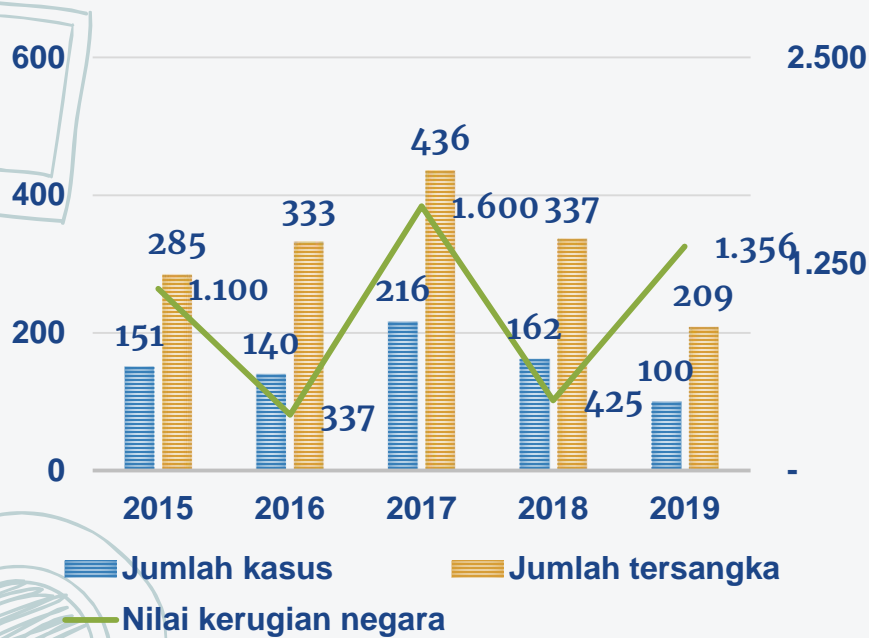
KINERJA PENINDAKAN KASUS KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TAHUN 2019



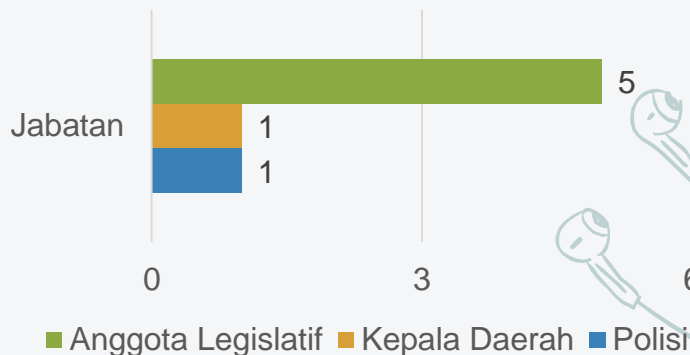
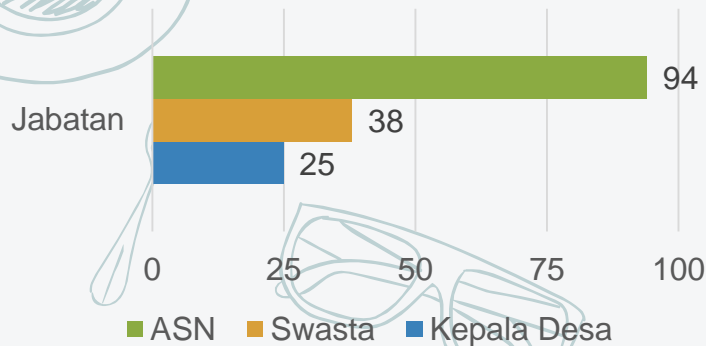
- ✗ 6.250 Kejaksaan memiliki 520 kantor di seluruh Indonesia yang terdiri dari 488 Kejari, 31 Kejati, dan 1 Kejaksaan Agung.
- ✗ 5.000 Berdasarkan DIPA Petikan tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, setiap kejaksaan di tingkat daerah maupun pusat memiliki target penanganan kasus korupsi di tingkat penyidikan, antara lain: Kejari (1 kasus); Kejati (2 kasus); dan Kejaksaan Agung (75 kasus). Sehingga secara total kejaksaan memiliki target kasus sebanyak 625 per tahun
- ✗ 3.750 Berdasarkan data, kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan menurun signifikan sejak tahun 2018.
- ✗ 2.500 Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja kejaksaan dalam menangani kasus korupsi belum signifikan. Apalagi jika dilihat dari aktor yang ditangkap oleh kejaksaan paling banyak berasal dari jabatan pelaksana. Hanya sedikit memiliki jabatan strategis yang ditangkap oleh kejaksaan.



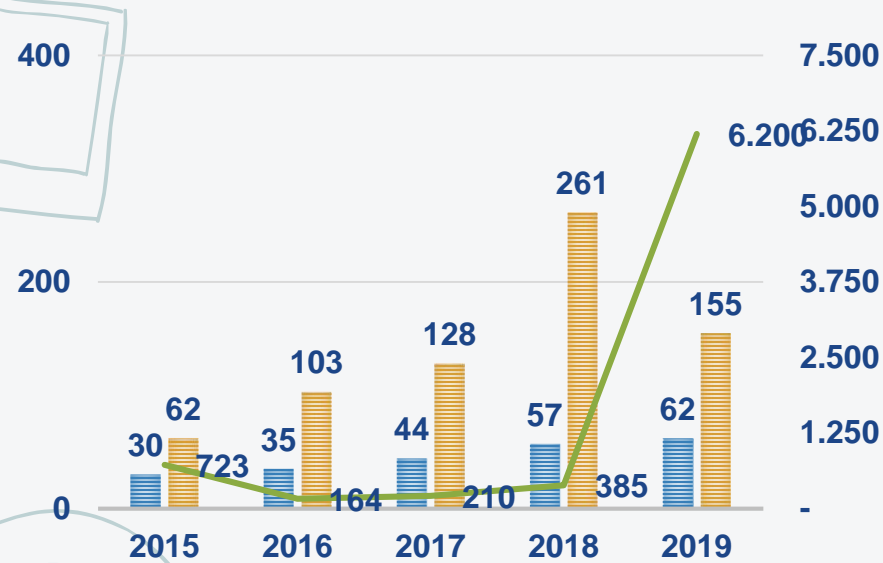
KINERJA PENINDAKAN KASUS KORUPSI OLEH KEPOLISIAN TAHUN 2019



- ✗ Kepolisian memiliki 535 kantor di seluruh Indonesia yang terdiri dari 500 Polres, 34 Polda, dan 1 Bareskrim.
- ✗ Berdasarkan DIPA Petikan tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, setiap kepolisian di tingkat daerah maupun pusat memiliki target kasus, antara lain: Polres (1 kasus); Polda (20 kasus); dan Bareskrim (25 kasus). Sehingga target kepolisian menangani kasus korupsi per tahun sebanyak 1.205 kasus.
- ✗ Kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepolisian menurun signifikan sejak tahun 2018.
- ✗ Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja kepolisian dalam menangani kasus korupsi belum signifikan. Apalagi jika dilihat dari aktor yang ditangkap oleh kepolisian paling banyak berasal dari jabatan pelaksana. Hanya sedikit memiliki jabatan strategis yang ditangkap oleh kepolisian.

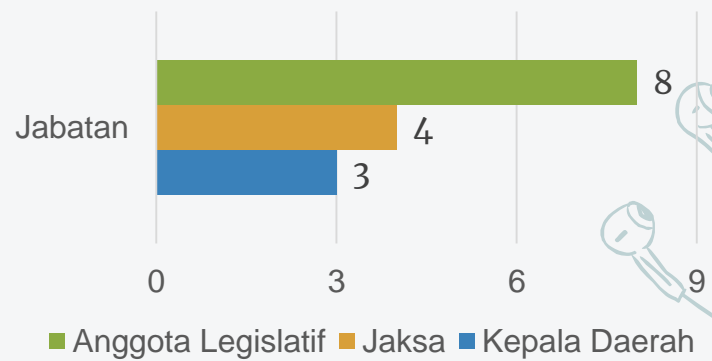
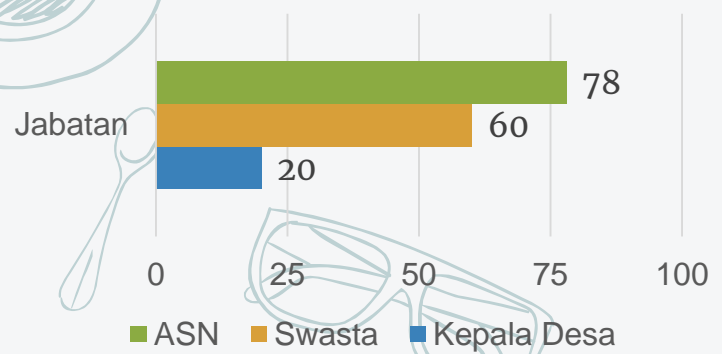


KINERJA PENINDAKAN KASUS KORUPSI OLEH KPK TAHUN 2019



■ Jumlah kasus ■ Jumlah tersangka
— Nilai kerugian negara

- ✘ KPK hanya memiliki 1 (satu) kantor yaitu di tingkat pusat.
- ✘ Berdasarkan DIPA Petikan tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, KPK menargetkan sebanyak 105 kasus selama tahun 2019.
- ✘ Kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK meningkat signifikan sepanjang tahun 2015 hingga 2019.
- ✘ Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja KPK selama ini sangat signifikan. Terutama ketika banyaknya aktor yang memiliki jabatan strategis ditangkap oleh KPK, seperti menteri, hakim, kepala daerah, anggota legislative dan jaksa.



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Sepanjang 2019, penegak hukum berhasil menindak kasus korupsi sebanyak 271 kasus dengan menetapkan tersangka sebanyak 580 orang. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi sebesar Rp8,4 triliun.
2. Suap menjadi modus yang paling dominan dilakukan oleh para tersangka korupsi. Selain itu, penyalahgunaan wewenang menjadi modus yang berimplikasi terhadap besarnya kerugian negara yang ditimbulkan seperti kasus yang dilakukan oleh Bupati Kotawaringin Timur terkait dengan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP).
3. Penindakan kasus korupsi selama tahun 2019 mengalami penurunan secara drastis dibandingkan tahun 2018.
4. Turunnya jumlah penanganan perkara korupsi terjadi di institusi kejaksaan dan kepolisian.
5. Sementara kinerja penindakan korupsi yang dilakukan oleh KPK sangat signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dari meningkatnya penanganan perkara korupsi sejak tahun 2015 hingga 2019. Aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pun tidak jarang memiliki kewenangan yang besar seperti menteri, kepala daerah, anggota legislatif bahkan penegak hukum.

1. Karena suap merupakan modus utama dalam tindak pidana korupsi, pemerintah dan Lembaga pemberantasan korupsi terkait perlu merumuskan strategi pencegahan praktek suap dengan memperkuat sistem integritas badan publik, salah satunya melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Dominannya praktek suap perlu menjadi prioritas bagi Kejaksaan dan Kepolisian untuk mulai fokus pada penanganan tipikor berjenis suap.
2. Selain fokus pada pidana suap, penegak hukum perlu mengefektifkan penggunaan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai strategi mengoptimalkan pengembalian asset kejahatan korupsi dan pemiskinan pelaku korupsi.
3. Penegak hukum perlu mengefektifkan pidana korporasi untuk meningkatkan efek jera. Pada saat yang sama, pemerintah perlu mengevaluasi keseluruhan mekanisme perijinan sektor SDA dan lingkungan hidup yang rentan terhadap praktek penyuapan dan menimbulkan kerugian multi dimensi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6. Sayangnya, penegak hukum belum menjadikan instrumen TPPU sebagai upaya utama untuk memiskinkan koruptor. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya pengenaan pasal pencucian uang terhadap pelaku korupsi (1 persen dari total perkara korupsi).
 7. Anggaran desa menjadi sektor yang paling banyak terjadi sepanjang tahun 2019. Selain itu, sektor bencana alam, pertambangan, peradilan, penegakan hukum, dan lapas kurang dijadikan sebagai prioritas dalam penegakan hukum meskipun dampak yang ditimbulkannya besar.
 8. Secara umum aktor yang paling banyak melakukan korupsi yakni ASN dan swasta.
4. Kepolisian dan kejaksaan perlu meningkatkan transparansi informasi mengenai penanganan perkara kasus korupsi ke publik agar publik dapat secara bersama memantau proses penegakan hukum.
 5. Fenomena korupsi anggaran desa yang terus muncul perlu dijadikan sebagai catatan serius bagi pemerintah untuk mendorong keterbukaan dan akuntabilitas keuangan desa dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah juga perlu melakukan upaya pendampingan kepada kepala desa dan aparaturnya agar dapat mengelola anggaran desa dan memperkuat kapasitas warga desa untuk mengawasi dana desa.
 6. Pemerintah perlu memperkuat kode etik ASN dan mempertegas sanksi bagi pidana korupsi yang melibatkan ASN mengingat setiap tahun, jumlah tersangka korupsi terbanyak berasal dari ASN. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan internal di badan-badan pemerintah untuk mencegah praktek korupsi.
 7. Efektifnya kerja penindakan KPK dibandingkan dengan Lembaga penegak hukum lain memberikan sinyal tegas bahwa segala bentuk pelemahan terhadap KPK perlu dihindari. Oleh karena itu, segala kemungkinan untuk memperkuat kembali KPK bisa dilakukan, salah satunya dengan menerbitkan PerPU KPK yang selama ini dijanjikan oleh Presiden Jokowi.



TERIMA KASIH!

